

Kajian Tarif Impor dan Kinerja Kebijakan Harga Dasar terhadap Daya Saing di Pasar Dunia

Qomarudin

Universitas Wisnuwardhana Malang

Abstract: The tariff setting seems vary with large or small countries. It contributes to additional source of government revenue to finance the useful social project. Flexible import tariff setting matched with rupiah exchange rate must be important to determine the base price of product or the price of product supply. The application of import excise policy instrument has been relevant to stimulate producer to make a product. Import excise needs to be carefully designed and realistic to relieve the consumers from burdens. Base Price Policy should be higher from import parity price to cause recently improvement of Indonesia import. In other spot, import tariff policy persuades importer to consider "moral hazard" by committing the smuggling and documentary manipulation such that data do not correspond with the reality. A key to compete within free competitive market in the liberalization era will be efficiency in which the product can be equipped with comparative and competitive strengths. It must be just appropriate to have Indonesia to drive forward the products with competitive or comparative capabilities throughout the world, and therefore, the domestic production should be pushed into worldwide market.

Keywords: import tariff, base price performance, worldwide competition

Era globalisasi ekonomi sebagai konsekuensi dari kesepakatan GATT/WTO (*General Agreement on Tariff and Trade/World Trade Organization*) oleh revolusi teknologi transportasi, telekomunikasi dan informasi telah membuat perekonomian setiap negara terintegrasi secara global. Sementara itu, liberalisasi memaksa setiap negara membuka segala rintangan dan investasi internasional serta menghapus segala proteksi dan subsidi bagi perekonomian domestiknya. Perpaduan antara liberalisasi ekonomi dan revolusi teknologi transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah mengaburkan batas-batas geografis antar negara sehingga setiap negara terintegrasi ke dalam suatu masyarakat dunia tanpa batas (*borderless world*). Dalam kondisi demikian, menciptakan kemandirian ekonomi hanya dapat dipertahankan

dengan memantapkan ketahanan ekonomi melalui peningkatan daya saing (Solahuddin, 1999).

Sejalan dengan arah perdagangan secara umum, perdagangan komoditas misalnya beras telah menunjukkan perubahan fenomenal. Di masa lalu, sebagai bagian dari kebijakan stabilisasi harga dalam negeri, Bulog memegang monopoli dalam impor komoditas seperti beras, kedelai, jagung, dan gandum. Dengan kewenangan tersebut, Bulog dapat mengatur waktu dan jumlah impor komoditas untuk mengamankan cadangan dalam negeri. Dengan demikian, pengaruh fluktuasi harga internasional pada harga komoditas dalam negeri relatif kecil dengan koefisien variasi di bawah 9% (Sudaryanto dan Rachman, 2000).

Menurut Rachman, *et al.* (2001) substansi dari kebijakan harga dimaksudkan untuk: (1) menjamin nilai tukar produk yang wajar terhadap produk lain, (2) meminimalkan tingkat fluktuasi harga antar musim/tahun sebagai upaya mewujudkan stabilitas harga, (3) mengendalikan tingkat harga pada garis trend yang sesuai dengan sasaran inflasi dan perkembangan harga dunia, dan (4) mendorong bekerjanya mekanisme pasar secara efisien dan efektif.

Alamat Korespondensi:

Qomarudin, Fakultas Ekonomi Universitas Wisnuwardhana Malang Jl. Danau Sentani 99 Malang

Selanjutnya, pasar yang ideal adalah pasar yang dalam kelembagaannya tidak terjadi kesenjangan informasi (*asymmetric Information*) diantara pelaku ekonomi, dan pasar yang sukses adalah pasar yang menghasilkan sumber daya secara optimal. Menurut pendekatan kesejahteraan ekonomi berlaku asumsi bahwa pelaku ekonomi memiliki *perfect foresight* sehingga tidak ada *asymmetric information*, tidak ada ketidakpastian dan tidak ada biaya transaksi. Sebaliknya, pasar akan gagal bilamana salah satu dari anggapan-anggapan dasar tersebut tidak terpenuhi. Informasi yang dimiliki sama bagi setiap pelaku ekonomi adalah salah satu syarat utama tercapainya keseimbangan dalam pasar.

Berpijak dari informasi dan permasalahan di atas, maka kajian ini difokuskan untuk melihat tarif impor, pembatasan impor (*import quota*), kinerja kebijakan harga di pasar dunia, tarif impor dalam mengamankan harga dasar dan dampaknya terhadap pelaku pasar, dan diakhiri kesimpulan

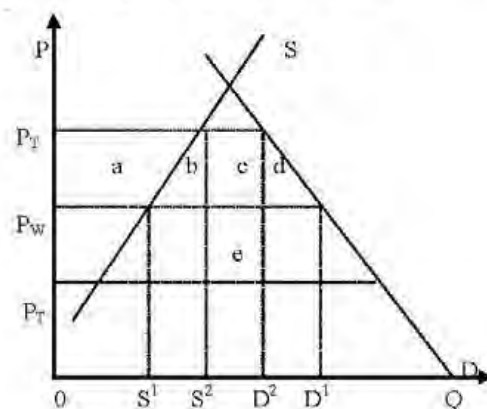
TARIF IMPOR

Tarif merupakan suatu kebijakan perdagangan yang paling umum, adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif Spesifik (*Specific Tariffs*) dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang diimpor. Tarif *advalorem* (*ad valorem tariffs*) adalah pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor. Dalam kedua kasus dampak tarif akan meningkatkan biaya pengiriman barang ke suatu negara.

Tarif merupakan bentuk kebijakan perdagangan yang paling tua dan secara tradisional telah digunakan sebagai sumber penerimaan pemerintah. Di awal abad kesembilan belas tarif digunakan untuk melindungi hasil-hasil produksi dari persaingan impor (*Corn Law*) di Inggris, di samping itu tarif biasa pula digunakan untuk melindungi sektor-sektor industri yang baru tumbuh. Penerimaan yang berasal dari tarif merupakan perolehan yang pasti bagi suatu negara, karena penerimaan ini dikumpulkan oleh pemerintah. Tarif dapat menjadi sumber tambahan pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek sosial yang bermanfaat ataupun dapat digunakan sebagai pengganti beberapa jenis pajak.

Kariyasa (2002) menjelaskan tarif akan berbeda dampaknya apabila dikenakan di "negara besar" atau di "negara kecil". Manfaat dan biaya atau dampak tarif di masing-masing negara dikaji pada Gambar 1. Tanpa tarif maka harga dunia sebesar P_w . Apabila negara pengimpor (Domestik) merupakan negara yang dapat mempengaruhi harga dunia, maka setelah ada tarif sebesar t maka akan berakibat:

- Tarif mengakibatkan kenaikan harga domestik dari P_w ke P_T serta menurunkan harga ekspor (Asing) dari P_w ke P_T . Produksi dalam negeri meningkat dari S^1 ke S^2 , sedangkan konsumsi dalam negeri turun dari D^1 ke D^2 .



Gambar 1. Biaya dan Manfaat Tarif di Negara Besar

Keterangan:

Kerugian konsumen: $a + b + c + d$

Keuntungan produsen: a

Keuntungan penerimaan pemerintah: $c + e$

Production distortion loss: b

Consumption distortion loss: d

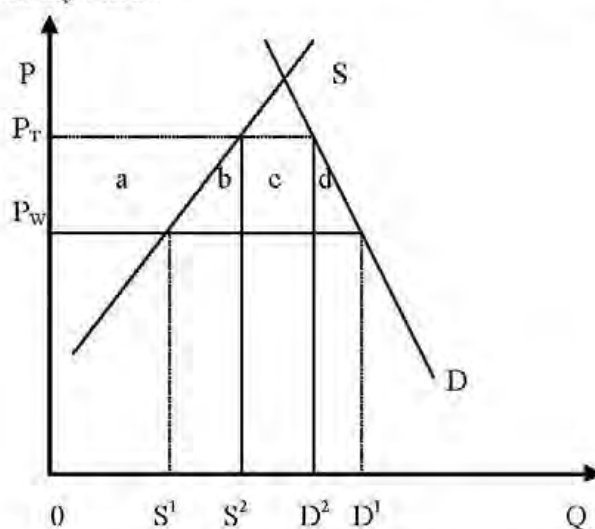
Dead Weight Loss (DWL): $b + d$

- Biaya dan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dapat dinyatakan sebagai penjumlahan bidang a, b, c, d, e .

Produsen memperoleh harga yang lebih tinggi dengan keuntungan sebesar bidang a , peningkatan perbedaan antara $P \times Q$ dan bidang di bawah kurva penawaran. Konsumen dalam negeri menghadapi harga yang lebih tinggi, kerugian konsumen domestik sebesar bidang $a + b + c + d$, berkurangnya perbedaan antara bidang di bawah kurva permintaan dan $P \times Q$.

Pemerintah memperoleh keuntungan dengan memperoleh penerimaan tarif. Penerimaan pemerintah sebesar tingkat tarif t dikalikan dengan volume impor $QI = D2 - S2$. Karena $t = P_T - P_T^*$, penerimaan pemerintah sebesar bidang $c + e$. Berarti ada dua "segitiga" yang mencerminkan kerugian (b dan d), yang merupakan kerugian yang mencerminkan ketidakefisienan (*efficiency loss*) yang timbul karena tarif, serta ada satu "empat persegi panjang" yang mengukur perimbangan manfaatnya (e). Bidang persegi panjang ini mencerminkan keuntungan nilai tukar perdagangan (*terms of trade gain*) yang muncul karena tarif menyebabkan harga ekspor negara lain turun.

Selanjutnya, dampak tarif netto terhadap kesejahteraan terdiri dari segitiga b dan d . Segitiga b merupakan *production distortion loss* atau *consumption effect* yang merupakan kerugian karena menghambat konsumsi barang impor yang lebih bernilai dibandingkan dengan biaya yang membebani negara. Kerugian-kerugian ini harus dibandingkan dengan keuntungan dari nilai tukar perdagangan yang diukur sebagai akibat adanya tarif.



Gambar 2. Biaya dan Manfaat Tarif di Negara Kecil

Keterangan:

- Kerugian konsumen: $a + b + c + d$
- Keuntungan produsen: a
- Keuntungan penerimaan pemerintah: $c + e$
- Production distortion loss: b
- Consumption distortion loss: d
- Dead Weight Loss (DWL): $b + d$

Dampak tarif untuk kasus "negara kecil" dimana negara tidak dapat mempengaruhi harga ekspor berakibat meningkatkan harga barang yang diimpor sebesar tingkat tarif, dari P_w ke $P_w + t$. produksi meningkat dari S^1 ke S^2 , sedangkan konsumsi turun dari D^1 ke D^2 . Bedanya dengan negara besar, kasus penerapan tarif di negara kecil kehilangan bidang e , yaitu bidang yang mencerminkan keuntungan nilai tukar perdagangan, dan ini jelas menunjukkan bahwa tarif menurunkan kesejahteraan. Tarif merusak rangsangan bagi produsen maupun konsumen dalam mengambil keputusan karena impor menjadi lebih mahal daripada yang sebenarnya terjadi jika tidak ada hambatan perdagangan.

Krugman dan Obstfeld (2000) Konsekuensi Liberalisasi Perdagangan atas Penurunan atau Penghapusan Tarif, di antaranya adalah sebagai berikut:

- Harga yang berlaku di seluruh negara anggota adalah harga dunia P_w
- Akibat perdagangan bebas, penurunan tarif sebesar t berdampak: konsumen di negara kecil menerima kenaikan kesejahteraan relative lebih besar dibandingkan konsumen di negara besar. Hal ini disebabkan penurunan harga akibat perdagangan bebas sebesar tarif (t), sedangkan penurunan harga pada konsumen di negara besar lebih kecil dari tarif dikarenakan tarif ditanggung oleh konsumen domestik dan pengeksport.
- Harga saat berlakunya perdagangan sama dengan harga dunia yang berarti tidak lagi merangsang produsen untuk meningkatkan produksinya. Satu-satunya yang harus diperbuat oleh produsen adalah efisiensi agar mempunyai daya saing tinggi untuk bersaing di pasar domestik dan pasar internasional yang nantinya terbebasa dari restriksi perdagangan.
- Perdagangan bebas merupakan suatu peluang bagi negara pengeksport untuk semakin memperluas jangkauan perdagangannya. Negara-negara besar yang pada awalnya seringkali mengalami "kejenuhan" pasar kini semakin terbuka untuk memasok produknya ke berbagai negara termasuk negara sedang berkembang dengan tidak lagi mengalami hambatan tarif maupun non tarif. Satu kata kunci untuk mampu bersaing dalam pasar persaingan bebas di era liberalisasi perdagangan

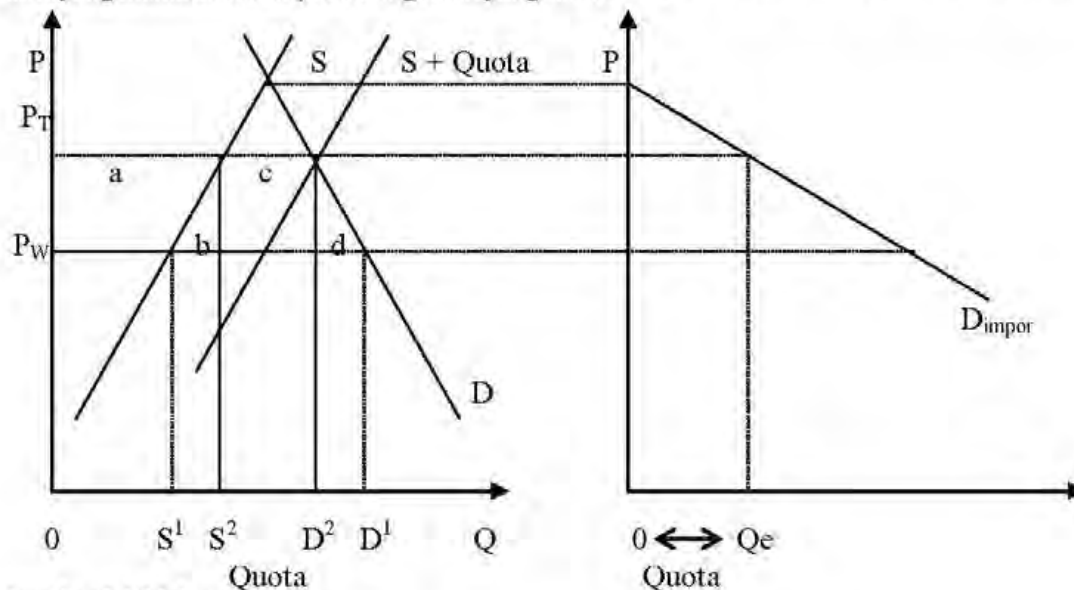
adalah efisiensi sehingga produk-produknya mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.

PEMBATASAN IMPOR (*IMPORT QUOTA*)

Pembatasan impor (*Import Quota*) merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi impor yang sah kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan dan terbatas serta melarang impor tanpa lisensi (Martin, 2003). Pembatasan impor selalu meningkatkan harga barang yang diimpor di pasar dalam negeri. Jika impor dibatasi, akibat langsungnya adalah bahwa pada tingkat harga semula (sebelum ada pembatasan) permintaan untuk barang yang bersangkutan lebih besar dari penawaran domestik plus impor. Keadaan ini menyebabakan harga lebih tinggi sampai keseimbangan baru tercapai. Akhirnya, pembatasan impor akan meningkatkan harga di dalam negeri yang besarnya sama dengan tarif yang menurunkan impor ke tingkatan yang sama.

Perbedaan dampak antara tarif dengan kuota adalah pemerintah akan memperoleh penerimaan apabila menerapkan tarif, sedangkan penerapan kuota tidak memberikan penerimaan pada pemerintah. Jika pemerintah memilih memberlakukan kuota, bukan tarif untuk membatasi impor, besarnya pendapatan yang akan diperolehnya dengan mengenakan tarif dapat diperolehnya dengan memungutnya dari siapa saja yang menerima lisensi impor. Pemegang lisensi dapat mengimpor dan menjualnya di dalam negeri dengan harga yang lebih tinggi. Keuntungan yang diperoleh pemegang lisensi dikenal sebagai rente pembatasan (*quota rents*).

Ada beberapa alasan mengapa pemerintah sering memilih kuota daripada tarif. *Pertama*, untuk mengendalikan pengeluaran impor yang lebih lanjut apabila persaingan dari luar negeri semakin meningkat. *Kedua*, memberikan keluwesan dan kekuasaan dalam menangani perusahaan-perusahaan dalam negeri. Hanya saja kesulitan yang mungkin muncul adalah apabila kuota menciptakan kekuatan monopoli (baik



Gambar 3. Efek Kuota Impor

Keterangan:

Pemerintah membatasi impor (kuota impor) sebesar S^2D^2

Kerugian konsumen: $a + b + c + d$

Keuntungan produsen: a

Keuntungan pemegang lisensi: c

Production distortion loss: b

Consumption distortion loss: d

Dead Weight Loss (DWL): $b + d$

dari perusahaan dalam negeri maupun pengeksport (luar negeri) dan apabila lisensi impor dialokasikan secara tidak efisien. Penjelasan grafis diberlakukannya kuota impor, disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3 menjelaskan bahwa dengan berlakunya harga dunia (P_w) mengakibatkan kelebihan permintaan, oleh karenanya perlu dilakukan impor dari luar negeri. Keterbatasan pemerintah mengakibatkan pembatasan impor guna merangsang produsen untuk meningkatkan produksinya guna memenuhi permintaan dalam negeri. Kuota ditetapkan oleh pemerintah sebesar $S^2 D^2$.

Kuota telah mendorong produsen dalam negeri untuk meningkatkan produksi sebesar S^1 ke S^2 sebagai akibat meningkatnya harga dari harga dunia P_w menjadi P_r . Kenaikan harga menyebabkan penurunan konsumsi dari D^1 ke D^2 . Seperti halnya tarif dalam kuota inipun menimbulkan surplus produsen sebesar bidang a dan penurunan kesejahteraan konsumen sebesar bidang a + b + c + d. Adapun keuntungan pemegang lisensi sebesar c yang merupakan jumlah kuota dikalikan dengan P_r . Seperti halnya tarif, penerapan kuota menyebabkan *Dead Weight Loss* (DWL) sebesar bidang b dan d. Bidang b sebagai akibat inefisiensi sisi produksi dan bidang d sebagai akibat inefisiensi sisi konsumsi.

Dengan diterapkannya liberalisasi perdagangan dimana hambatan non-tarif harus dikonversi menjadi ekuivalen tarif (tarifikasi), maka yang ada hanyalah persaingan diantara pengeksport yang memang benar-benar efisien dalam proses produksinya. Pada awalnya pemberian lisensi seringkali bukan didasarkan rasionalitas tetapi seringkali mengarah pada praktik kolusi dan nepotisme. Pemberian lisensi seringkali dimanipulasi hanya dengan negara-negara yang termasuk dalam mitra dagang, sehingga menutup kemungkinan negara lain memasuki dalam kelompok dagang tersebut. Hal inilah yang dihindari dalam perdagangan bebas, sehingga terbuka bagi semua pengeksport untuk memasuki pasar dunia dengan mendasarkan pada efisiensi.

KINERJA KEBIJAKAN HARGA DI PASAR DUNIA

Pasar mewakili kelembagaan ekonomi, maka pemerintah mewakili politik dan masyarakat mewakili sosial, masing-masing perlu menjalankan peran yang

ideal. Ini juga berarti bahwa kinerja perkembangan maupun kemunduran pasar di pengaruhi & mempengaruhi kekuatan pemerintah maupun masyarakat.

Fenomena berbeda muncul seiring dengan perubahan rejim pasar komoditas dari pasar terkendali ke pasar bebas yang menyebabkan harga komoditas di pasar domestik semakin terbuka terhadap gejolak pasar. Fluktuasi harga tersebut dapat bersumber dari fluktuasi produksi dalam negeri, fluktuasi harga internasional dan fluktuasi nilai tukar (Simatupang, 2002). Terjadinya transmisi harga dari pergerakan nilai tukar dan harga produk di pasar dunia terhadap dinamika harga produk domestik mengindikasikan kuatnya asosiasi dari ketiga dimensi pasar tersebut.

Bagi negara Indonesia, dengan diberlakukannya perdagangan bebas, di satu sisi merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam upaya meningkatkan efisiensi produksi, dan di sisi lain adalah sebagai peluang untuk meningkatkan produksi dalam negeri melalui pemanfaatan sumberdaya yang masih melimpah. Implikasinya adalah merupakan suatu kebijakan yang tepat jika Indonesia berorientasi memacu produk-produk yang mempunyai daya saing atau keunggulan komparatif di pasar dunia. Misalnya untuk komoditas beras sejak tahun 1995 Indonesia adalah sebagai negara besar dalam impor beras, dan tanpa adanya upaya memacu produksi dalam negeri maka diperkirakan volume impor Indonesia akan terus meningkat. Namun akhir-akhir ini produksi beras di Indonesia semakin menurun. Sehingga pertanyaannya adalah kenapa peningkatan produksi beras di Indonesia relatif lamban? Pertanyaan berikutnya adalah apakah betul negara-negara lain mampu memproduksi beras dengan biaya murah sehingga mampu melempar di pasar dunia dengan harga yang relatif murah pula? Oleh karena itu, kebijakan yang kondusif dan efektif, baik pada sisi *output* maupun sisi *input* sangat diperlukan dalam upaya memacu produksi beras dalam negeri dan juga mempunyai daya saing di "pasar bebas", walaupun dalam realitanya tidak pernah terlaksana sepenuhnya.

Di sisi lain, sejarah telah membuktikan bahwa ketidakstabilan persediaan komoditas pangan khususnya beras di Indonesia telah memicu munculnya kerusuhan nasional yang mengarah pada tindak kriminal (Handewi, 2001). Hal ini menunjukkan pentingnya

ketersediaan beras yang diikuti oleh pendistribusiannya yang merata, dengan harga terjangkau.

Kasali (2005, 79) mengidentifikasi kegagalan pasar atas dua sumber penyebab, yaitu: 1) *bounded rationality*, keterbatasan kemampuan untuk menganalisis suasana ketidakpastian (atau keadaan yang kompleks) dan karakter pelaku ekonomi rasional yang oportunis, 2) faktor-faktor lingkungan, misalnya ketidaknyamanan dari berbagai ketidakjelasan yang mengganggu proses transaksi maupun harapan hasil.

Dampak krisis ekonomi telah menyebabkan pendapatan riil masyarakat semakin menurun, dan di sisi lain harga beras dalam negeri yang cenderung mengikuti harga dunia, sehingga pemerintah hanya meresponnya dengan memperbaiki insentif melalui penetapan harga dasar yang lebih tinggi.

Kebijakan Harga Dasar Gabah (HDG) yang lebih tinggi dari harga paritas impor telah mendorong terjadinya peningkatan impor beras Indonesia akhir-akhir ini. Di sisi lain, kebijakan tarif impor merangsang bagi importir untuk melakukan "moral hazard" dengan melakukan penyelundupan dan manipulasi dokumen sehingga sering terdengar adanya ketidaksesuaian data dengan realita pada akhir-akhir ini (Kariyasa, 2000).

Penerapan harga dasar untuk komoditas telah berumur cukup lama, ditetapkan pertama kali pada MT 1969/70 dan dan satu-satunya kebijakan yang

masih dipertahankan sampai sekarang. Sejak awal tahun 1990-an, harga dasar ditetapkan di samping memperhatikan biaya produksi dan inflasi, juga berdasarkan harga di pasar internasional (Sawit, 2001). Memasukan unsur harga internasional menjadi menarik, karena untuk menikmati harga internasional bila harganya tinggi atau harga internasional dipakai sebagai patokan biaya oportunitas dan ukuran efisiensi. Harga dasar yang mengikuti rumus tersebut adalah bergerak antara harga FOB Bangkok dengan CIF karena Indonesia sebagai negara net importir.

Sebenarnya sejak krisis periode krismon, harga dasar yang ditetapkan pemerintah sudah tidak mampu mengejar kenaikan harga produk (misalnya harga beras) di pasar dunia karena pengaruh depresiasi rupiah yang begitu tajam. Harga dasar semakin tinggi di atas harga FOB manakala penurunan harga di pasar dunia bersamaan pula dengan menguatnya nilai rupiah terhadap US\$ (Amang dan Sawit, 2001). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Pada Tabel 1 juga nampak bahwa mulai bulan Januari 2006, harga dasar sekitar 42–63% di atas harga FOB. Kelemahan harga dasar yang jauh lebih tinggi di atas FOB dan didukung semakin terbukanya pasar dunia, menyebabkan semakin sulitnya implementasi harga dasar, biaya menjadi sangat mahal apabila harga dasar harus dipertahankan sepanjang tahun,

Tabel 1. Harga Beras FOB dan Harga Dasar/Pembelian untuk Kualitas Medium (Rp/kg)

Tahun	Harga FOB (HFOB)	Harga Dasar (HD)	Rasio HD thd HFOB
2001	586,01	592	101
2002	685,43	657	96
2003	778,84	738	95
2004	855,90	856	100
2005	2725,29	1660	61
2006	1765,91	2310	131
Jan - 07	1520,19	2310	142
Feb - 07	1624,98	2310	152
Mar - 07	1584,72	2310	146
Apr - 07	1484,88	2310	156
Mei - 07	1544,57	2310	150
Jun - 07	1577,28	2310	146
Jul - 07	1610,35	2310	143
Agt - 07	1483,13	2310	156
Sep - 07	1444,52	2310	160
Okt - 07	1418,28	2310	163

(Sumber: M. Husen Sawit, 2001)

akan memperbesar risiko penyelundupan serta menyuburkan praktik KKN. Sebagai konsekuensi, kondisi ini juga telah banyak memicu munculnya penyelundupan dan KKN di antara pelaku pasar beras. Kondisi ini secara umum menunjukkan bahwa implementasi HDG di tingkat petani tidak efektif. Kondisi di lapangan ini sejalan dengan teori ekonomi, karena komoditas produk (misalnya, gabah/beras) penawarannya bersifat inelastis, dimana penurunan produksi yang terjadi telah mampu memacu kenaikan tingkat harga yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan produksi tersebut.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa kebijakan harga dasar baru yang ditetapkan pemerintah yang telah efektif berlaku sejak 1 Januari 2006, akan semakin sulit untuk diimplementasikan dibandingkan kebijakan harga dasar sebelumnya, jika tidak ada peningkatan komitmen di antara para pelaku pasar. Tanpa diikuti instrumen pendukungnya, kebijakan harga dasar baru ini justru hanya akan menguntungkan para pedagang saja.

TARIF IMPOR DALAM MENGAMANKAN HARGA DASAR DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKU PASAR

Dalam upaya menstimulasi pertumbuhan produksi komoditas (misalnya pertanian) domestik pemerintah menerapkan kebijakan berlingkup makro dan mikro secara terpadu. Kebijakan makro diarahkan untuk menciptakan kondisi kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya produksi pangan, kelancaran distribusi dan meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup. Dari sisi mikro, kebijakan diarahkan untuk mewujudkan peningkatan produktivitas, efisiensi, pemerataan pendapatan dan peningkatan daya saing (Rachman *et al.*, 2001).

Masalah pangan bukanlah hal yang dapat dianggap remeh karena hal tersebut adalah masalah yang sangat serius dan strategis. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditunda pemenuhannya barang sekejap. Tidak tersedianya pangan dapat memberi pengaruh besar yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Sebaliknya penyediaan pangan yang cukup memberi pengaruh yang positif bagi pembangunan suatu negara (Amang, 2001).

Kenyataan mendorong setiap negara berusaha memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan berbagai cara, seperti mendorong produksi dalam negeri atau melalui perdagangan dunia. Namun tidak semua negara mampu untuk menerapkannya.

Sementara itu, penerapan instrumen kebijakan bea masuk impor dipandang sangat relevan untuk merangsang produsen dalam berproduksi. Penetapan bea masuk impor perlu dirancang secara hati-hati dan realistis sehingga tidak memberatkan konsumen, namun masih tetap memberikan insentif untuk berproduksi. Bea masuk impor yang ditetapkan mengacu dan antisipatif terhadap perubahan harga produk dunia dan kurs rupiah sehingga dapat merefleksikan kekuatan permintaan dan penawaran domestik. Di samping itu, kebijakan lainnya yang dipandang penting adalah kebijakan harga dasar/harga pengadaan (*procurement price*). Kombinasi tarif impor dan penetapan harga dasar/harga pengadaan produk (misalnya gabah) dipandang efektif dalam upaya mengantisipasi menurunnya harga impor (Rachman, *et al.*, 2001).

Upaya mengamankan harga produk (misalnya gabah) melalui penenaan kebijakan tarif bea masuk perlu dilakukan sejalan dengan penetapan harga pengadaan produk (misalnya gabah) oleh pemerintah. Perlunya penetapan tarif impor yang fleksibel sesuai dengan pergerakan kurs rupiah sangat penting jika dikaitkan dengan penetapan harga dasar produk atau harga pengadaan produk (misalnya gabah). Sementara itu, dari perspektif makro penenaan tarif impor tidak bersifat *inflatoir*, di mana setiap kenaikan 1% harga impor (misalnya beras) hanya akan menaikkan harga domestik sebesar 0,04%, sehingga bea masuk 30% hanya akan meningkatkan harga domestik 1,2% dengan sumbangan inflasinya sebesar 0,07% (PPIP Badan Agribisnis, 1999). Konsisten dengan penelitian Dawe (1999) yang mengungkapkan bahwa bea masuk 25% tidak akan berdampak inflasi, sedangkan bea masuk 30% hanya menaikkan harga beras domestik 5% serta dampak inflasinya 0,32%.

Dalam regim *tariff barrier* (TB), tarif impor menjadi salah satu instrumen penting dalam perdagangan internasional. Tarif lebih transparan dan pemerintah memperoleh pendapatan dari kebijakan ini dibanding dengan monopoli impor (Sawit, 2001). Akan tetapi monopoli impor lebih ampuh untuk membandung arus masuk beras ke pasar dalam negeri,

karena dilakukan oleh satu lembaga sehingga mudah mengontrolnya. Sebaliknya bea masuk (tarif impor) belum tentu dapat menjamin berkurangnya impor karena negara kita adalah negara kepulauan dan aparat pelaksana di lapangan masih amat lemah sehingga mudah dihindangi KKN.

Tarif impor dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu tarif spesifik, *ad valorem* dan campuran. Tarif spesifik ditetapkan misalnya sekian Rp per unit barang impor, sedangkan *ad valorem* ditentukan atas dasar persentase dari nilai impor. Tarif spesifik dapat mencegah importir nakal memanipulasi dokumen impor terutama permainan harga, namun tarif ini dinilai kurang "fair" karena terlepas dari nilai dan kualitas barang. Sementara itu, dalam pengenaan tarif *advalorem* dibutuhkan adanya aparat yang kompeten dan jujur, karena jenis tarif ini membuka peluang untuk KKN. Dampak penerapan tarif impor beras terhadap distribusi pendapatan dapat dianalisis dengan pendekatan parsial ekuilibrium.

KESIMPULAN

Kebijakan harga dasar yang ditetapkan pemerintah dalam memperbaiki tingkat harga relatif kurang efektif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan harga dasar yang ditetapkan pemerintah jauh di atas harga paritas impor, sehingga menyebabkan membanjirnya produk (misalnya beras) impor yang masuk Indonesia. Untuk mencegahnya pemerintah memberlakukan tarif impor. Namun dalam kenyataannya kebijakan tarif ini juga kurang efektif, karena adanya perbedaan harga yang cukup menarik sebesar tarif tersebut sehingga mengundang munculnya penyelundupan-penyelundupan, manipulasi dokumen dan KKN. Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta angkatan laut yang masih lemah turut mendukung terjadinya hal ini. Agar tarif impor tersebut efektif maka pemerintah harus mampu memperbaiki kinerja dari aparat bea cukai dan memperkuat sistem pengamanan pada angkatan laut.

Kebijakan tarif impor telah berdampak terhadap distribusi pendapatan di antara pelaku pasar. Berkurangnya surplus konsumen, meningkatnya surplus produsen, serta adanya kerugian sosial (akibat terjadinya inefisiensi produksi dan inefisiensi ekonomi) seiring dengan besarnya tingkat tarif yang diberlakukan. Akan tetapi untuk penerimaan pemerintah akan meningkat

seiring dengan meningkatnya tarif yang diberlakukan, dan setelah mencapai *equilibrium* akan mengalami penurunan dan berlawanan arah dengan kenaikan tarif. Oleh karena itu, besarnya tarif impor sebaiknya berangsur-angsur dikurangi sampai titik nol, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian setiap negara sebaiknya berusaha untuk mendorong produksi dalam negeri dengan berbagai cara, sehingga pada akhirnya dapat bersaing di perdagangan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amang, B., dan M.H. Sawit. 2001. *Kebijaksanaan Beras dan Pangan Nasional: Pengalaman dari Orde Baru dan Orde Reformasi*, edisi revisi. Bogor: IPB Press.
- Dawe, D. 1999. *The Future of The World Rice Market and Policy Options to Contract Rice Price Instability*. IIRI, 1999.
- Kariyasa, K. 2002. Kinerja Kebijakan Harga Dasar Gabah dan Dampak Tarif Impor terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Makalah Teori Harga*. Bogor: Program Pascasarjana IPB.
- _____, dan M.O. Adnyana. 2000. *Perumusan Kebijakan Harga Gabah dan Pupuk Dalam Era Pasar Bebas*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Bogor.
- Kasali, R. 2005. *Membidik Pasar Indonesia: Segmentasi, Targeting, dan Positioning*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Krugman, P.R., and Obstfeld, M. 2000. *International Economics*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Martin, S. 2003. *Industrial Economics: Economic Analysis and Public Policy*. New York: Mc-Millan Publishing Company.
- PPIP Badan Agribisnis. 1999. *Dampak Penerapan Bea Masuk Impor Beras terhadap Pendapatan Petani*. Jakarta: Badan Agribisnis.
- Rachman, B., H. Malian, Sri, II., dan K. Kariyasa. 2001. *Dinamika dan Prospek Harga dan Perdagangan Komoditas Pertanian dalam Prosiding Persepektif Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2001 ke Depan*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Sawit, M.H. 2001. *Kebijakan Harga Beras: Periode Orba dan Reformasi*. Bunga Rampai Ekonomi Beras. Jakarta: LPEM-UI Press.
- Simatupang, P. 2002. *Kemitraan Berdasarkan Paradigma Ekonomi Biaya Transaksi*. Bogor: Pusat Penelitian.

Solahuddin, S. 1999. *Pembangunan Era Reformasi*. Jakarta: Departemen Pertanian.

Sudaryanto, T., dan B. Rachman. 2000. *Arah Kebijakan Distribusi/Perdagangan Beras dalam Mendukung*

Ketahanan Pangan. Distribusi/Perdagangan Luar Negeri, Semiloka Perberasan, Ditjen Tanaman Pangan dan Hortikultura. Jakarta: Departemen Pertanian.